



**KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI
GEOSTRATEGI INDONESIA**

Yudi Ariana, M.H.

A. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

Tiga sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional:

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi, sudut pandang ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi
2. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan. Metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara
3. Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara

B. PERKEMBANGAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD

Pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia dan Singapura

Akankah pengaruh itu akan masuk ke Indonesia?

Untuk itu perlu adanya kekuatan nasional yang antara lain: berupa unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional untuk menghadapi komunisme.

Tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD (Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat) tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional)

Gagasan dan pemikiran perlunya kekuatan nasional guna menghadapi ancaman dilembagakan dalam bentuk ketahanan nasional

Tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan nasional

Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia



Tahun 1972, spektrum ancaman diperluas:

ANCAMAN

TANTANGAN

HAMBATAN

GANGGUAN



Konsepsi ketahanan nasional pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu Ketetapan MPR No IV/MPR/1973, berlanjut pada GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988

Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan nasional sampai GBHN 1998. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998 adalah rumusan yang terakhir

GBHN 1999 - sebagai GBHN terakhir sebab sesudahnya tidak menggunakan GBHN lagi - tidak lagi ditemukan perumusan akan konsepsi ketahanan nasional

Sifat Pokok Geostrategi Indonesia:

1. Bersifat daya tangkal

Sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia

2. Bersifat *developmental*/pengembangan

Pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat

(Syahril Syarbaini, 2010: 298)

Hakikat Ketahanan Nasional:

Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara

Sifat-Sifat Ketahanan Nasional:

1. Manunggal
2. Mawas ke dalam
3. Kewibawaan
4. Berubah menurut waktu
5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan
6. Percaya pada diri sendiri
7. Tidak bergantung pada pihak lain

C. UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL

Unsur/faktor/eleman/gatra apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan nasional sebuah negara?

Pendapat ahli:

1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau, terbagi menjadi dua faktor yaitu:
 - a. faktor tetap (*stable factors*) terdiri atas geografi dan sumber daya alam
 - b. faktor berubah (*dinamic factors*) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional dan kualitas diplomasi

2. James Lee Ray:
 - a. *Tangible factors* terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer;
 - b. *Intangible factors* terdiri atas karakter nasional, moral nasional dan kualitas kepemimpinan

3. Palmer & Perkins, terdiri atas: tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi , moral dan kepemimpinan

4. Parakhas Chandra, terdiri atas tiga yaitu:
 - a. Alamiah: geografi, sumber daya dan penduduk
 - b. Sosial: perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya & moral nasional;
 - c. lain-lain: ide, intelegensi, dan diplomasi, kebijaksanaan kepemimpinan

5. Alfred T. Mahan, terdiri atas: letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional & sifat pemerintahan
6. Cline, terdiri atas: sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional dan kemauan nasional
7. Unsur kekuatan nasional model Indonesia (gatra) dikembangkan oleh Lemhanas. Dikenal dengan nama Asta Gatra yang terdiri atas Tri Gatra dan Panca Gatra
 - a. Tri gatra adalah aspek alamiah (*tangible*), terdiri atas: penduduk, sumber daya alam, dan wilayah
 - b. Panca gatra adalah aspek sosial (*intangible*), terdiri atas: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

D. PEMBELAAN NEGARA

Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional

Bela negara adalah setiap upaya untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri

Landasan hukum bela negara?

Konsep Bela Negara:

- a. Secara fisik, yaitu dengan memanggul bedil menghadapi serangan atau agresi musuh
- b. Bela negara secara nonfisik, yaitu segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara



Bela negara perlu dipahami dalam arti sempit (fisik) dan dalam arti luas (fisik dan nonfisik)



2. Peraturan Perundang-undangan tentang Bela Negara

a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Kedua

b. Pasal 30 UUD 1945 Perubahan Kedua

Pelaksanaan pasal ini terdapat dalam:

1). UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2). UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

3). UU No, 34 Tahun 2004 tentang TNI

3. Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara

a. Bela Negara secara Fisik

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan:

- 1). Menjadi anggota TNI
- 2). Pelatihan Dasar Kemiliteran, melalui program Rakyat Terlatih (Ratih) yang mempunyai fungsi:
 - (a). Ketertiban umum
 - (b). Perlindungan masyarakat
 - (c). Keamanan rakyat
 - (d). Perlawanan rakyat

Beberapa unsur Rakyat Terlatih (Ratih):

- (a). Resimen Mahasiswa (Menwa)
- (b). Perlawanan Rakyat (Wanra)
- (c). Pertahanan Sipil (Hansip)
- (d). Mitra Babinsa
- (e). Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
- (f). Wajib Militer (Wamil)

b. Bela Negara secara Nonfisik

Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- 1). Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak;
- 2). Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat;
- 3). Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika);

LANJUTAN..

- 4). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang, dan menjunjung tinggi HAM;
- 5). Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Allah SWT, melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing

4. Identifikasi Ancaman terhadap Bangsa dan Negara

Ancaman dapat diartikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa

Kategori Ancaman:

a. Ancaman militer

Menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa: agree, spionase, dll.

b. Ancaman nonmiliter/nirmiliter: konflik komunal, kejahatan lintas negara, perusakan lingkungan, bencana alam, penyakit



E. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

Bentuk ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas tidak sekedar fisik dan politis. Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa

Globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa, namun di sisi lain menimbulkan ancaman yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara

Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan harus mampu menghadapi ancaman global yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara

Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian (Kontingen Garuda/Konga) yang dimulai sejak tahun 1957

Keanggotaan Indonesia dalam dewan keamanan PBB:

1. keanggotaan pertama periode 1973-1974
2. keanggotaan kedua periode 1995-1996
3. keanggotaan ketiga periode 2007-2008



Beberapa pendapat mengenai Global dan Globalisasi:

1. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti universal atau internasional.
2. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional
3. Globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Sebagai sebuah proses, globalisasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. terkait erat dengan kemajuan teknologi, arus informasi, dan komunikasi yang lintas batas negara;
2. tidak dapat dilepaskan dari adanya akumulasi kapital, tingginya arus investasi, keuangan, dan perdagangan global;
3. berkaitan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia, barang, jasa, dan pertukaran budaya yang lintas batas negara;
4. ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan dan ketergantungan tidak hanya antarbangsa/negara tetapi juga antarmasyarakat (Poppy S. Winanti dalam Winarno, 2007: 191)

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika

Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 2016, Jakarta: Ghalia

<https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-mengancam-ketahanan-nasional/>

<https://dribbble.com/>

<https://id.pinterest.com/>